

# RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Probolinggo, Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO



## DAFTAR ISI

Sampul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN TAHUN 2023 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....	78
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	78
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah .....	92
3.3 Program dan Kegiatan .....	94
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK .....	119
BAB V PENUTUP .....	134

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Perangkat Daerah) PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Berdasarkan pasal 13, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Fungsi Renja sesuai dengan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan penetapan Renja Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

a. Tahap persiapan penyusunan

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

b. Tahap penyusunan rancangan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Tahap penetapan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja SKPD merupakan muatan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor 000.7.2.4/11/425.201/2024 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyusunan Renja PD Tahun 2025.

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2024 adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 486);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6).
16. Peraturan Wali Kota No. 7 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 219 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo Dan Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo
18. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2024.

### **1.3. MAKSUM TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai dasar dalam penentuan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD;
- b) Menjabarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026 ke dalam rencana kerja tahunan;
- c) Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

#### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

- a) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025;
- c) Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**TAHUN 2023**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, satu Unit Pelaksana Teknis dan tiga Unit Pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 sampai dengan 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi *output* yang diharapkan.

Capaian Kinerja tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Reviu hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Tabel di bawah ini mencantumkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 Kota Probolinggo dengan pokok-pokok materi yang tersaji antara lain:

- a) Pagu dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran induk tahun 2023 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sebesar Rp. 9.469.741.342,00 dengan

sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Realisasi anggaran sampai dengan triwulan empat sebesar Rp. 13.279.691.803,00.

Sampai dengan triwulan empat terdapat Perubahan APBD yang merubah pagu menjadi Rp. 15.847.399.455,00 dengan tiga sumber dana, yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

**b) Capaian Program**

Pada tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengampu 3 urusan, dengan melaksanakan 12 program, 23 kegiatan, dengan 58 sub kegiatan. Adapun capaian program adalah sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan outcomes persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan sebesar 92,64%;
- 2) Program pemberdayaan sosial dengan outcomes persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan sosial sebesar 98,82%;
- 3) Program rehabilitasi sosial dengan outcomes persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial capaiannya sebesar 94,68%;
- 4) Program perlindungan dan jaminan sosial dengan outcomes persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial capaiannya sebesar 73,33%;
- 5) Program penanganan bencana dengan outcomes persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan bencana terealisasi sebesar 94,78%;
- 6) Program pengelolaan taman makam pahlawan dengan outcomes persentase TMP yang terkelola dengan capaian 98,25%;
- 7) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan outcomes persentase peningkatan peran serta kelompok masyarakat dan perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender (PUG) tercapai 95,86%;
- 8) Program perlindungan perempuan dengan outcomes persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dengan capaian 66,24%;

- 9) Program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan outcomes persentase data gender dan anak yang terpilah capaiannya sebesar 100%;
  - 10) Program pemenuhan hak anak dengan outcomes persentase pencapaian indikator kota layak anak capaiannya sebesar 97,47%;
  - 11) Program perlindungan khusus anak dengan outcomes persentase efektivitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak capaiannya 90,64%;
  - 12) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dengan outcomes persentase peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat tercapai 97,68%.
- c) Dibandingkan dengan target sesuai renstra maka capaian yang dicapai memenuhi target pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai dalam melaksanakan visi dan misi walikota sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Untuk lebih jelasnya melihat hasil capaian pelaksanaan tahun 2023 terhadap Renstra Perubahan dapat diuraikan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**  
**(Tabel T-C. 29)**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2022 s.d 2024)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) (Tahun 2022 s.d 2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
			Target (Tahun 2023)	Realisasi (Tahun 2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	8 = (7/6)	9	10=(jumlah (5+7+9))	11=(jumlah 10/9 x 100)
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100	100	100%	N/A	N/A	N/A

1.06.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100%	5	5	N/A
1.06.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100%	4	N/A	N/A
<b>1.6.1.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	100	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	42	100%	36	N/A	N/A
1.06.01.2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700	1103	158%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	4	3	75%	17	N/A	N/A
<b>1.06.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%	1	N/A	N/A

<b>1.6.1.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
<b>1.6.1.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.06.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
1.06.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.06.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100%	12	N/A	N/A
1.06.01.2.06.000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	6	100%	6	N/A	N/A
1.06.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	100%	24	N/A	N/A

1.06.01.2.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	100%	12	N/A	N/A
<b>1.06.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
1.06.01.2.07.000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A
1.06.01.2.07.000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	7	100%	10	N/A	N/A
<b>1.06.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
1.06.01.2.08.000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100%	4	N/A	N/A
1.06.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	12	N/A	N/A
1.06.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.06.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	N/A	N/A
<b>1.06.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A

1.06.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.06.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	29	100%	26	N/A	N/A
1.06.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	2	50%	30	N/A	N/A
1.06.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82	82	100%	82	N/A	N/A
1.06.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	4	100%	4	N/A	N/A
<b>1.6.2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A
<b>1.06.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A
1.06.02.2.03.000 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	29	29	100%	29	N/A	N/A

1.06.02.2.03.000 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	100%	5	N/A	N/A
1.06.02.2.03.000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	13	13	100%	14	N/A	N/A
1.06.02.2.03.000 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	100%	1	N/A	N/A
<b>1.6.4</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100%</b>	<b>85,00</b>	N/A	N/A
1.06.04.2.01.	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A

1.06.04.2.01.000 1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	146	140	96%	99	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	28	112%	10	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	50	N/A	N/A

1.06.04.2.01.000 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A
1.06.04.2.01.000 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.001 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.01.001 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.06.04.2.01.001 2	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>1.06.04.2.02.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Percentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.000 3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80	80	100%	300	N/A	N/A
1.06.04.2.02.000 4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100%	100	N/A	N/A
1.06.04.2.02.000 5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	14	N/A	N/A
1.06.04.2.02.000 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		Kabupaten/Kota						
1.06.04.2.02.000 8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.001 0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.04.2.02.001 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	25	N/A	N/A
1.06.04.2.02.001 2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
1.06.04.2.02.001 3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
1.06.04.2.02.001 4	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A

<b>1.6.5</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>80,00</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A
<b>1.06.05.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi</b>	<b>80,00</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A
1.06.05.2.02.000 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800	5977	747%	800	N/A	N/A
1.06.05.2.02.000 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2330	1691	73%	2200	N/A	N/A
1.06.05.2.02.000 4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	117	117	100%	97	N/A	N/A
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Percentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan</b>	<b>80,00</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	N/A	N/A

1.06.06.2.01.000 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.01.000 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.01.000 3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.01.000 4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.06.06.2.01.000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>1.06.06.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>80,00</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	<b>80,00</b>	N/A	N/A
1.06.06.2.02.000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225	134	60%	130	N/A	N/A

<b>1.6.7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Presentase TMP yang dikelola	<b>85,00</b>	<b>81</b>	<b>95%</b>	<b>85,00</b>	N/A	N/A
<b>1.06.07.2.01.</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik</b>	<b>90,00</b>	<b>80</b>	<b>89%</b>	<b>90,00</b>	N/A	N/A
1.06.07.2.01.000 1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	N/A	N/A
1.06.07.2.01.000 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	70	70	100%	8	N/A	N/A
1.06.07.2.01.000 3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36	36	100%	36	N/A	N/A
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>							

<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	<b>51,00</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
<b>2.08.02.2.01.</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas</b>	<b>55,00</b>	<b>52</b>	<b>95%</b>	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	100%	N/A	N/A	N/A
2.08.02.2.01.000 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	100%	35	N/A	N/A
2.08.02.2.01.000 7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A
<b>2.08.02.2.02.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>6,00</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>6,00</b>	N/A	N/A

2.08.02.2.02.000 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100%	2	N/A	N/A
2.08.02.2.02.000 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23	23	100%	23	N/A	N/A
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
2.08.03.2.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	100%	2	N/A	N/A
<b>2.08.03.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi</b>	<b>Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A

<b>Kewenangan Kabupaten/Kota</b>								
2.08.03.2.02.000 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24	24	100%	24	N/A	N/A
2.08.03.2.02.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	100%	25	N/A	N/A
<b>2.08.03.2.03.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
2.08.03.2.03.000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41	41	100%	41	N/A	N/A

<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Percentase data gender dan anak yang dikelola dan dimanfaatkan</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>	N/A	N/A
<b>2.08.05.2.01.</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase data gender dan anak yang terpilih</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	N/A	N/A
2.08.05.2.01.000 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100%	1	N/A	N/A
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Percentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	90	N/A	N/A
<b>2.08.06.2.01.</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	80	N/A	N/A
2.08.06.2.01.000 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27	27	100%	10	N/A	N/A

2.08.06.2.01.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35	35	100%	2	N/A	N/A
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
2.08.06.2.02.000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29	29	100%	29	N/A	N/A
2.08.06.2.02.000 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	100%	3	N/A	N/A
2.08.06.2.02.000 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34	34	100%	1	N/A	N/A
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Percentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A

2.08.07.2.01	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
2.08.07.2.01.000 4	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A
<b>2.08.07.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
2.08.07.2.02.000 6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A
<b>2.08.07.2.03.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	N/A	N/A
2.08.07.2.03.000 6	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A

2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>56%</b>	<b>90</b>	N/A	N/A
<b>2.13.05.2.01.</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>56%</b>	<b>90</b>	N/A	N/A
2.13.05.2.01.000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A

2.13.05.2.01.000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A
2.13.05.2.01.000 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	100%	1	N/A	N/A
2.13.05.2.01.000 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A

## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo tidak terlepas dari Undang - undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman pada pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.

Untuk urusan Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD yang merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari:

**Tabel T-C.30**

### PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 21	Tahun 22	Tahun 23	Tahun 24	Tahun 2023	Tahun 24	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	

	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	N/A	10 0%	10 0%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelangan dan Peninggalan diluar panti	Jumlah warga negara/gede landangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	100 %	N/A	10 0%	10 0%	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi Korban Bencana Kota	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	10 0%	74,80 %	N/A	10 0%	10 0%	

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

### Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN				
	Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2023)	Target Kinerja 2025	2026
<b>Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat</b>	Persentase PMKS	%	46,28	42	40
<b>Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,49	96,78	96,91

### PENERAPAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis Pelayanan Dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh Kementerian Sosial dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 pelayanan dasar, yaitu:

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
- b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
- d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti; Dan
- e) Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial tahun 2023 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.095.731.599,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.013.253.945,00 (92,47%) dan personil sejumlah 15 orang.

## Realisasi Kinerja SPM Bidang Sosial Kota Probolinggo

Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Realisasi (%)		Kategori Indeks
		Indikator	Tarif (%)	2022	2023	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %	100 %	TUNTAS PARIPU RNA
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	100 %	100 %	TUNTAS PARIPU RNA
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	98.67%	100 %	TUNTAS PARIPU RNA
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	98.67%	100 %	TUNTAS PARIPU RNA
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	Jumlah warga negara korban bencana kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100 %	74,80%	

Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023 yang telah mencapai 100% atau Tuntas Paripurna, yaitu:

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti,
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti.

Sedangkan yang belum 100% adalah terdapat 1 SPM, dengan realisasi pencapaian SPM ssebesar 80% yaitu:

1. perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pascabencana bagi korban bencana.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2023 adalah:

- a. Belum optimalnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah;
- b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar, keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat.
- c. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis dan gelandangan.
- d. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan peningkatan target dan capaian SPM perlu penyediaan fasilitas fisik dan non fisik sesuai dengan Permendikbud 16 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial.

Beberapa solusi yang akan dilakukan terkait permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta lintas daerah terkait dengan penanganan pascabencana dan penanganan PMKS.
- b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengajukan usulan untuk melengkapi sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud

## **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat yang menghadapi tantangan dan kesulitan khusus dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial melibatkan kebijakan dan program-program untuk membantu mereka melewati situasi sulit. Berikut adalah beberapa isu strategis yang relevan:

- 1) Kemiskinan dan Pengangguran: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi risiko kemiskinan dan kesulitan dalam mendapatkan

pekerjaan yang layak. Program-program yang membantu mereka mengakses pelatihan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, atau memberikan dukungan keuangan dapat membantu mengatasi isu ini.

- 2) Perumahan dan Ketersediaan Rumah: Masalah perumahan seringkali menjadi kendala bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kebijakan perumahan yang terjangkau, program bantuan perumahan, dan upaya untuk mengatasi tunawisma menjadi isu strategis dalam konteks ini.
- 3) Kesehatan Mental dan Fisik: Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial menghadapi tantangan dalam hal kesehatan mental dan fisik. Layanan kesehatan mental yang terjangkau dan dukungan kesehatan yang holistik menjadi isu kritis.
- 4) Pendidikan dan Keterampilan: Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk membantu penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkatkan peluang mereka di pasar kerja. Kebijakan pendidikan inklusif dan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka menjadi isu strategis.
- 5) Diskriminasi dan Stigma: Penyandang masalah kesejahteraan sosial sering menghadapi diskriminasi dan stigma sosial yang dapat menghambat integrasi mereka dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi diskriminasi dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu ini menjadi isu strategis penting.
- 6) Keamanan Sosial: Perlindungan sosial dan jaringan keamanan sosial menjadi isu strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau situasi krisis. Program bantuan sosial yang efektif dapat membantu menyediakan perlindungan finansial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 7) Kekerasan dan Keamanan: Penyandang masalah kesejahteraan sosial mungkin rentan terhadap situasi kekerasan atau ketidakamanan. Membangun lingkungan yang aman dan memberikan dukungan bagi mereka yang menghadapi kekerasan adalah isu strategis.
- 8) Partisipasi Masyarakat: Penting untuk memastikan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional menjadi isu strategis.
- 9) Keterlibatan Keluarga dan Jaringan Dukungan: Membangun dan memperkuat jaringan dukungan sosial, termasuk peran keluarga, adalah penting bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program dukungan keluarga dan pemberdayaan komunitas menjadi isu strategis dalam konteks ini.

10) Akses Layanan Sosial dan Hukum: Memastikan akses yang mudah dan adil ke layanan sosial, kesehatan, dan hukum adalah isu strategis. Hal ini mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan administratif dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke layanan tersebut.

11) Isu inklusif disabilitas menjadi sorotan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Inklusivitas disabilitas bukan hanya tentang memahami dan mengakui keberagaman kondisi fisik dan mental, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi penuh dan setara bagi semua individu, tanpa memandang kondisi disabilitas mereka. Saat kita merenungi perjalanan seseorang yang hidup dengan disabilitas, kita menyadari bahwa inklusivitas bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi suatu prinsip yang mendefinisikan kemanusiaan kita bersama. Ini adalah panggilan untuk menyusun fondasi masyarakat yang memahami, menghargai, dan mendukung perbedaan.

Namun, upaya inklusif tidak hanya berkutat pada aspek fisik dan pendidikan. Masyarakat perlu memberikan dukungan emosional dan sosial yang memadai bagi individu dengan disabilitas. Stigma dan diskriminasi harus dihadapi dan diubah, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima tanpa syarat.

Mengatasi isu-isu strategis ini memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berdasar data akhir tahun 2023 Jumlah PMKS di kota Probolinggo terdapat 112.880 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi diantaranya: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan.

Perlu dipahami bahwa dalam penanganan PMKS, didapatkan kondisi bahwa tidak semua PMKS dapat menikmati hasil pembangunan dan hidup secara layak, berkualitas serta bermartabat. Masih banyak masyarakat dalam

rentang perjalanan kehidupannya mengalami kesulitan, hambatan dan permasalahan yang menghambat keberfungsiannya sosialnya secara layak, bermartabat dan mampu mengembangkan diri.

Disisi lain, penanganan PMKS belum terlaksana secara optimal dan telah menjadi isu bersama baik permasalahan internal maupun eksternal dari PMKS itu sendiri. Faktor internal yang dirasakan PMKS adalah ketidakberdayaannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pemanfaatan dalam mengakses sistem-sistem sumber yang ada secara normatif. Sedangkan faktor eksternal adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat dan belum optimal pemerintah dalam penanganan permasalahan PMKS yang berada di masyarakat. Hal itu dikarenakan sebagai berikut:

- 1) Rendahnya sinergitas penyelenggaraan pelayanan sosial baik melalui lembaga pelayanan sosial pemerintah maupun bukan pemerintah/swasta.
- 2) Organisasi/Tim bekerja sendiri sendiri sesuai dengan kewenangan atau bidangnya masing-masing.
- 3) Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang sosial.
- 4) Berdasarkan data BPS per 20 November 2023 jumlah masyarakat miskin Kota Probolinggo mencapai 107.120 jiwa, masyarakat miskin ini ditandai dengan kondisi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan tidak mampu melakukan kegiatan usaha produktif.
- 5) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, di antaranya adalah PSKS dan pekerja-pekerja sosial.

b. Masih Banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Isu-isu yang perlu ditangani dalam konteks Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota probolinggo yaitu:

- a. Menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berdasarkan data tahun 2023 terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Perempuan	Jumlah kasus Anak
2021	28	19
2022	24	22
2023	26	29

Sumber data: Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo, 2023

- b. Masih adanya ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat dalam pemenuhan indikator 7 prasyarat pengarusutamaan gender (PUG). Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena komitmen tersebut belum dijabarkan dalam bentuk-bentuk yang operasional. Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain.
3. Kebijakan pelaksanaan urusan masih banyak yang netral gender. Hal ini disebabkan oleh karena perspektif gender belum terintegrasi pada regulasi
4. keterbatasan SDM PPPA yang sensitif dan responsif gender. Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM PPPA belum didukung dengan sistem training yang memadai, seperti adanya modul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik PPPA. Kapasitas PUG yang dibutuhkan SDM diantaranya adalah memahami konsep PUG, serta trampil dalam melakukan analisis gender dan mengimplementasikan PUG. Keterbatasan SDM juga dirasakan di tingkat kelurahan dan pemanfaat. Masih dibutuhkannya Penyuluhan yang mempunyai peran yang strategis dalam fasilitasi masyarakat. Pemahaman yang baik tentang PUG oleh penyuluhan akan mempermudah tercapainya pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki di masyarakat.
5. Anggaran responsif gender (ARG) belum menyasar pada indikator kinerja pembangunan. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja Kota. Bahkan tidak sedikit yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya. Manfaat ARG memang tidak terletak pada output, tetapi

pada dampak yang dihasilkan untuk merubah kesenjangan gender menjadi pembangunan yang lebih adil dan merata.

6. Data terpilah belum relevan dengan kebutuhan analisis gender. Hal ini disebabkan oleh karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti yang sampai kepada tingkat pemanfaat. Belum adanya KKP sudah ada panduan data terpilah dan telah dipedomani sehingga data terpilah sudah ada di masing-masing perangkat daerah. Tetapi data terpilah ini belum terkelola dalam sebuah sistem yang ter-update secara reguler. Selain itu, data juga belum sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan analisis gender.
7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender. Hal ini disebabkan oleh karena analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Analisis gender dilakukan untuk mengidentifikasi isu kesenjangan, sehingga berdasarkan kesenjangan tersebut disusun rencana aksi dan dialokasikan anggaran untuk melaksanakan rencana aksi tersebut sehingga persoalan kesenjangan dapat diatasi atau dikurangi. Tetapi jika analisis gender dilakukan diluar siklus atau mengalami keterlambatan, maka sudah melampaui batas waktu pengalokasian anggaran, sehingga manfaatnya kurang dapat dirasakan atau tidak dapat mempengaruhi anggaran.
8. Kebutuhan berbasis gender untuk pelaku perempuan belum mendapatkan respon yang memadai dalam pembangunan di kelurahan. Hal ini disebabkan oleh karena perempuan belum sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Ini mengindikasikan bahwa perempuan belum menjadi bagian penting dalam organisasi masyarakat, sehingga kurang memberi kepastian dalam mendapatkan akses terhadap pembangunan. Tidak terlibatnya perempuan dalam pembangunan menyebabkan kebutuhan perempuan tidak muncul sebagai masalah yang harus diselesaikan.

## **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo**

### 1. Tantangan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi PMKS;
- b. memperkuat peran PMKS dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memungkinkan PMKS dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasarnya dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan;
- e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- f. Kesadaran dan peran serta keluarga, masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah;
- g. Kelembagakan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

### 2. Peluang:

- a. Adanya jaringan kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial, seperti dengan LSM, CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;
- b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagai pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi dan sumber pelayanan yang ada;
- c. Kebijakan yang responsif dan mengarah pada pola jaminan sosial bukan bantuan sosial bagi PMKS yang tidak potensial, seperti Lanjut usia miskin, dan penderita cacat berat;
- d. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagan tersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. Adanya dukungan dari berbagai pihak baik eksternal maupun internal dalam membangun bersama untuk mengatasi permasalahan dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Kota Probolinggo sangat serius dalam upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Melalui Dinas Sosial P3A Pemerintah Kota Probolinggo berupaya untuk membantu pengentasan kemiskinan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan sosial dan Hibah. Ke depannya akan menjajaki untuk menggandeng pihak swasta melalui program CSR

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

**Tabel TC.31.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025**  
**Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get capai an	Pagu indikatif	Program/Kegiatan 2025	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get capai an	Pagu indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				9.286.0 92.877	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9.286.0 92.877	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kota Probol inggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100 Perse n	7.319.7 84.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kota Probol inggo	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	100 Perse n	7.103.3 40.077	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probol inggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Perse n	81.500. 000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Probol inggo	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	100 Perse n	300.690 .000	
Penyusunan Dokumen	Kota Proboli	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Doku	16.500.0 00	Penyusunan Dokumen	Kota Proboli	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Doku	9.900.00 0	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

Perencanaan Perangkat Daerah	nggo	Perangkat Daerah	men		Perencanaan Perangkat Daerah	nggo	Perangkat Daerah	men		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	290.790.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.168.885.791</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5.307.259.216</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	6.014.385.791	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang	5.250.873.216	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	94.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	700 Dokumen	7.800.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48.586.000	
<b>Administrasi Barang Milik</b>	<b>Kota Probol</b>	<b>Persentase Administrasi BMD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>12.287.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik</b>	<b>Kota Probol</b>	<b>Persentase Administrasi BMD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.350.000</b>	

<b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>inggo</b>	<b>Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>n</b>		<b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>inggo</b>	<b>Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>n</b>		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.287.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.350.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>36.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>252.420.468</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	24.000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	18.000.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12.000.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	234.420.468	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>271.631.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>308.473.243</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	32.515.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.332.100	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	28.000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	14.068.00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.306.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.026.00	

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.432.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.120.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	9.900.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	135.645.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	183.897.143	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	52.833.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	48.030.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>49.115.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>249.000.000</b>	
Pengadaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	22.825.000	Pengadaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	60.000.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	26.290.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	189.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>373.666.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</b>	<b>100 Persen</b>	<b>181.210.000</b>	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.163.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.870.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	122.843.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	129.690.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.660.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.650.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>326.700.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>502.937.150</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.932.050	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	155.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Probolinggo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	116.140.000	
Pemeliharaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	13.200.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Probolinggo	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	42.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	66.733.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	74.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Probolinggo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	268.131.600	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>81 Persen</b>	<b>89.608.307</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>81 Persen</b>	<b>60.708.800</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>80 Persen</b>	<b>89.608.307</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>80 Persen</b>	<b>60.708.800</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	29 Orang	15.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	29 Orang	7.575.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	67.608.307	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	45.975.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	1.499.800	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	5.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga	4.160.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Sertifikat	2.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Sertifikat	1.499.000	

		Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	86 Perse n	2.063.3 49.516	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Probolinggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	86 Perse n	1.132.3 81.000	
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Perse n	1.659.2 50.000	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80 Perse n	894.825 .000	
Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	901.250. 000	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	746.000. 000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	100 Orang	25.000.0 00	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	100 Orang	1.450.00 0	

		Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	37.250.00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	32.000.00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.500.00	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	225.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	29.875.00	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	225.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	7.700.000	

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	2.000.00 0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.500.00 0	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.0 00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40.000.0 00	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.000.00 0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.050.0 00	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.00 0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	1.500.00 0	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	20 Orang	30.000.0 00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	20 Orang	1.500.00 0	

		Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	35.000.00	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.500.00	0
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Percentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>80 Perse</b>	<b>404.099 .516</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Percentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>80 Perse</b>	<b>237.556 .000</b>	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	2.002.016	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		Kegiatan tidak jadi dilaksanakan
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	4.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	300 Orang	60.000.00	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	300 Orang	53.250.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75.000.00	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	94.496.00	
Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	185.000.00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	38.000.00	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	2.500.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		Kegiatan tidak jadi dilaksanakan
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	10.000.00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	7.260.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	13.400.00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	4.000.00	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	6.250.00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		Kegiatan tidak jadi dilaksanakan
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	7.500.00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	4.050.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	4.785.00 0	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10.500.0 00	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.0 00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.500.0 00	
Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.000.0 00	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	15.500.0 00	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8.662.50 0	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen		Kegiatan tidak jadi dilaksanakan
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>41 Perse n</b>	<b>642.504 .674</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>41 Perse n</b>	<b>556.144 .000</b>	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin</b>	<b>Kota Probol</b>	<b>Persentase Data Fakir Miskin yang</b>	<b>50 Perse</b>	<b>642.504 .674</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin</b>	<b>Kota Probol</b>	<b>Persentase Data Fakir Miskin yang</b>	<b>50 Perse</b>	<b>556.144 .000</b>	

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	inggo	sudah diverifikasi dan validasi	n		Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	inggo	sudah diverifikasi dan validasi	n		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800 Orang	410.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	800 Orang	373.427.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Keluarga	82.504.674	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Keluarga	92.625.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	116 Orang	150.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	179 Orang	90.092.000	
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan</b>	<b>81 Persen</b>	<b>435.468 .693</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan</b>	<b>81 Persen</b>	<b>304.862 .000</b>	
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan</b>	<b>80 Perse</b>	<b>215.000 .000</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan</b>	<b>80 Perse</b>	<b>156.146 .880</b>	

Penyediaan Makanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	30.000.00	Penyediaan Makanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	51.250.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	30.000.00	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	8.796.880	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	10.000.00	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Probolinggo	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	8.200.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	140.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	2.400.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Probolinggo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	5.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Probolinggo	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	85.500.000	

<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	80 Perse n	220.468 .693	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	80 Perse n	148.715 .120	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	220.468. 693	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	148.715. 120	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Probolinggo	<b>Presentase TMP yang dikelola</b>	86 Perse n	179.853 .091	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Probolinggo	<b>Presentase TMP yang dikelola</b>	86 Perse n	128.657 .000	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik</b>	90 Perse n	179.853 .091	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik</b>	90 Perse n	128.657 .000	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.053.0 91	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.750.00 0	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Maka m	40.000.0 00	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Maka m	30.400.0 00	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24 Lapor an	100.800. 000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24 Lapor an	89.507.0 00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				2.214.44 7.200	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				952.633. 200	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Probolinggo	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	53 Perse n	192.471 .426	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Kota Probolinggo	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	54 Perse n	288.890 .000	
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah</b>	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang	55 Perse n	66.400. 000	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah</b>	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang	55 Perse n	97.450. 000	

Kewenangan Kabupaten/Kota		dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas			Kewenangan Kabupaten/Kota		dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.400.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43.710.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	35.000.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	53.740.00	
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>6 Persen</b>	<b>126.071 .426</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>6 Persen</b>	<b>191.440 .000</b>	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	55.571.426	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	101.550.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisasi	70.500.00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Organisasi	89.890.00	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan</b>	100 Persen	192.392 .144	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan</b>	100 Persen	109.218 .200	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	100 Persen	2.042.144	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	100 Persen	500.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.042.144	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	500.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi</b>	100 Perse n	<b>155.500 .000</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi</b>	100 Perse n	<b>108.218 .200</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 Orang	67.500.0 00	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	24 Orang	100.193. 200	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layan an	88.000.0 00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Layan an	8.025.00 0	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan</b>	100 Perse n	<b>34.850. 000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan</b>	100 Perse n	<b>500.000</b>	

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41 Orang	34.850.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	41 Orang	500.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan</b>	<b>41 Persen</b>	<b>6.078.323</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan</b>	<b>42 Persen</b>	<b>5.500.000</b>	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Percentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	30 Persen	6.078.323	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Percentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	30 Persen	5.500.000	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.078.323	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.500.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</b>	<b>91 Persen</b>	<b>571.245 .044</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</b>	<b>92 Persen</b>	<b>540.000 .000</b>	

<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	Percentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	70 Persen	47.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Percentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA	70 Persen	109.063.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	22.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	12.025.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	97.038.000	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi</b>	<b>80 Persen</b>	<b>524.245 .044</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi</b>	<b>80 Persen</b>	<b>430.937 .000</b>	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Doku mem	50.750.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Doku mem	29.575.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Doku men	397.500.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Doku men	352.000.000	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Doku men	75.995.044	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Doku men	49.362.000	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan</b>	<b>100 Perse n</b>	<b>276.960 .119</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan</b>	<b>100 Perse n</b>	<b>9.025.000</b>	
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan</b>	<b>70 Perse n</b>	<b>61.000.000</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan</b>	<b>70 Perse n</b>	<b>500.000</b>	

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		khusus			Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		khusus			
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20 orang	61.000.00	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	20 orang	500.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100 Perse n</b>	<b>165.960 .119</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>100 Perse n</b>	<b>8.025.0 00</b>	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Probolinggo	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Layanan	165.960. 119	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Probolinggo	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Layanan	8.025.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>70 Perse n</b>	<b>50.000. 000</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	<b>70 Perse n</b>	<b>500.000</b>	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat	20 Orang	50.000.00	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat	20 Orang	500.000	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan

penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Perlindungan dan Penanganan AMPK			penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota		Perlindungan dan Penanganan AMPK				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				1.261.81 4.000		
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	91 Perse n	1.115.1 13.321	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	92 Perse n	1.261.8 14.000		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Perse n	1.115.1 13.321	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	90 Perse n	1.261.8 14.000		

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	51.750.00	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	34.800.00	Penyesuaian besar anggaran dengan kebutuhan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	920.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	834.150.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	136.763.321	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	50.000.00	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	1 Dokumen	6.600.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	1 Dokumen	342.864.000	

Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
---------------------------------------	--	---------------------------------------	--

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Probolinggo membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kota. Usulan-usulan tersebut kami tabung dari pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan kota, selain itu juga terdapat usulan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Probolinggo. Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

N o.	Program/Kegiatan Tahun 2025	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Probolin ggo	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	<b>86 Persen</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kota Probolin ggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlan- tar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	<b>80 Persen</b>	

	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Sembako bagi Anak Yatim sejumlah 50 Orang
	Penyedian Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Alat Bantu (kursi roda) bagi Lansia sejumlah 5 Orang
				5 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Alat Bantu (kursi roda) bagi Lansia sejumlah 5 Orang
	<b>Rehabiltasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	Kota Probolin ggo	<b>Percentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>80 Persen</b>	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	Usulan Musrenbang Bantuan Sembako bagi Eks Narapidana sejumlah 50 Orang
	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Kruk bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 5 Orang

				5 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Walker bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 5 Orang
				15 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Kursi Roda bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 15 Orang
				2 orang	Usulan Musrenbang Bantuan Alat Pendengar bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 2 Orang
				5 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Kaki Palsu bagi penyandang disabilitas (Bansos) sejumlah 5 Orang
2	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Kota Probolinggo	<b>Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	<b>41 Persen</b>	
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi</b>	<b>50 Persen</b>	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	150 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan sembako bagi Keluarga Miskin (Bansos)

			Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		sebanyak 150 orang
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	Usulan Musrenbang Peralatan Usaha Rombongan Bagi Fakir Miskin (Bansos) sebanyak 2 orang
				4 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Peralatan Usaha-Peralatan Pengolahan Kue (Dandang, Langseng dan Oven Kue) Bagi Fakir Miskin (Bansos) sejumlah 4 Orang
				1 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Peralatan Usaha - Mesin Spinner Peniris Minyak Bagi Fakir Miskin (Bansos) sejumlah 1 Orang
				3 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Peralatan Usaha - Peralatan Pengolahan Minuman (Blender dan Termos Es) Bagi Fakir Miskin (Bansos) sejumlah 3 Orang
				3 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Peralatan Usaha Etalase bagi Fakir Miskin (bansos) sejumlah 3 Orang

				5 Orang	Usulan Musrenbang Bantuan Peralatan Usaha Peralatan Dapur (Kompor, selang dan regulator, Tabung Gas, Dandang, Panci, Wajan, Serok, Spatula) Bagi Fakir Miskin (Bansos) sejumlah 5 Orang
	PROGRAM PENGARUSUTAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Probolinggo	Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	53 Persen	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	55 Persen	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Probolinggo	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Usulan Musrenbang Pelatihan PUG bagi Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 100 Orang
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan	6 Persen	

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	Usulan Musrenbang Pelatihan Olahan Makanan bagi PEKKA/Perempuan Korban Kekerasan sebanyak 32 Orang
				100 Orang	Usulan Musrenbang Pelatihan Pendidikan Pola Asuh bagi Masyarakat (PEKKA/Perempuan Korban Kekerasan/RT/RW/Unsur Masyarakat KK) sebanyak 100 Orang
				150 Orang	Usulan Musrenbang Sosialisasi Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, dan Manajerial (Pengambilan Keputuan) bagi Perempuan yang menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan sejumlah 150 Orang

Catatan : Memasukkan usulan musrenbang/pokir yang ditarik OPD (apabila tidak memiliki usulan musrenbang/pokir ditulis NIHIL)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Pemerintah telah menetapkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJPN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2045 adalah:

“NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 8 Misi yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi;
5. Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kesinambungan Pembangunan

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian/penelantaran anak - anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak(interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius,rekereasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas - tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksplorasi, diskriminasi dan bentuk -

bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

Selaras dengan RPJPN, Tema Pembangunan Kota Probolinggo tahun 2025 adalah **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Kemandirian Daerah Melalui Penguatan Ekonomi Inklusif Yang Didukung Pemenuhan Infrastruktur”**.

Untuk Dinas Sosial P3A, keterkaitan dengan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mayarakat, dimana sebagai Perangkat daerah yang mengampu urusan sosial, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa, mempunyai peran fungsi untuk melaksanakan fungsi koordinatif dengan perangkat daerah dan masyarakat yang terkait sesuai tema pembangunan dalam rangka mencapai target prioritas ke 6 yaitu Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat dalam upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Pelestarian Kebudayaan Lokal.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat melalui Indikator Kinerja Kunci di Urusan Sosial yang terdapat pada LPPD. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat Sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berikut Daftar Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025

yang terkait dengan Urusan Sosial serta Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	TARGET RKPD 2025	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
<b>I</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>				
1	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	29	
2	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	
	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	N/A	10	
3	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	14	14	
4	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	1	
5	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	99	100	
6	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	100	
7	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	20	
8	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20	
9	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	100	

10	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	100	
11	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	10	
12	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	50	
13	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20	
14	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	10	
15	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20	
16	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	20	
17	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	300	
18	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100	
19	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	14	17	
20	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	75	
21	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	50	

22	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	75	
23	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	
24	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	
25	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20	
25	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	800	800	
27	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2200	120	
28	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	97	179	
29	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	500	
30	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	250	
31	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	N/A	1	
32	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	100	
33	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	N/A	100	

34	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	130	225	
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
<b>I</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	2	
2	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	N/A	100	
3	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	
4	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	23	23	
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	
6	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	24	24	
7	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	25	100	
8	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	41	41	
9	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	

10	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	10	10	
11	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	
12	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	29	29	
13	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	
14	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	
15	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	orang	20	20	
16	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	15	15	
17	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	20	20	

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Tahun Pertama dari RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2045. Visi Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

**“PROBOLINGGO KOTA LOGISTIK TANGGUH, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”**

Visi ini untuk mengakomodasi kebutuhan penyelarasan kebijakan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2025-2045 yang salah satu fokusnya pada Pembangunan SDM, Ekonomi, Infrastruktur, maupun Lingkungan. Sehingga pemerintah harus dapat menghadirkan sebuah ekosistem lingkungan yang mana

meningkatkan perputaran ekonomi di Kota Probolinggo yang dapat dirasakan seluruh lapisan Masyarakat tanpa terkecuali.

Sedangkan Visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Probolinggo tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

**Mewujudkan Pembangunan Kota Probolinggo yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.**

dengan misi Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- MISI 1** Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah;
- MISI 2** Pembangunan Sumberdaya Manusia Unggul dan Berkarakter;
- MISI 3** Mewujudkan Pemantapan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat;
- MISI 4** Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- MISI 5** Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif dan Dinamis, serta Pelayanan; Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi'

### **3.1.1 Telaah Renstra K/L**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengacu pada dua telaah Kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang

dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sedangkan Telaah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

**2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

**3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :**

- a. *Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;

- b. *Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar

2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. *Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendektaan telaah kedua kementerian, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengambil Program kerja dari keduanya untuk diturunkan dan disesuaikan sebagai acuan berikut:

**Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"><li>Masih rendahnya Partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka turut serta berperan melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat</li><li>Model pemberdayaan</li></ul>	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang optimal	Pemberdayaan sosial yang maksimal

		sosial yang masih relatif membutuhkan kreativitas dari penyelenggara pemerintahan serta minimnya usulan model pemberdayaan dari penerima manfaat		
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implikasi ditutupnya beberapa lokalisasi di daerah lain menjadikan munculnya WRSE di kota Probolinggo. Dengan demikian dibutuhkan model dan metode yang tepat untuk mendukung proses tersebut</li><li>• Pendataan PMKS yang masih membutuhkan ketepatan sasaran dan data yang valid dalam rangka pelayanan yang tepat.</li><li>• Koordinasi teknis di tingkat Kecamatan/ Kelurahan dalam rangka pelayanan sosial yang berbasis masyarakat.</li><li>• Masih ada psikotik yang terpasung, untuk itu dibutuhkan langkah tepat</li></ul>	Sarana Prasarana belum memadai	Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam penanganan PPKS

		dalam kegiatan yang mampu membantu pelayanan sosial bagi psikotik yang masih terpasung		
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan sosial masih memerlukan pelayanan yang implementif seperti melalui advokasi sosial dan sheltered bagi AMPK maupun KTK.</li> <li>Penanganan korban bencana masih dalam tahap evakuasi, padahal proses mengembalikan fungsi sosial korban secara berkelanjutan merupakan arah penting untuk itu pelayanan bagi korban bencana masih membutuhkan model pelayanan terpadu. Model Kampung Siaga Bencana dalam rangka mitigasi bencana lebih ditingkatkan dan masih belum terbentuk di tiap kecamatan/kota yang rawan bencana</li> </ul>	Dukungan keterpaduan program antar sektor masih kurang	Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan PPKS sudah muncul
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kebijakan dalam penanganan PPKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Volunterisme (kesukarelawan) masyarakat dalam

				penanganan PPKS
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kebijakan dalam penanganan PPKS belum sinergi secara optimal dengan SKPD lain	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal
6.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Unit pelayanan Perempuan yang membutuhkan Perlindungan perempuan yang Berhadapan dengan hukum masih terbatas	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Unit Pelayanan Terpadu	Masih kuatnya nilai-nilai kekerabatan
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Dukungan keterpaduan program antar sector masih kurang	Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertikal
9.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kompetensi aparatur masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai di tingkat internal, kelompok Tribina maupun pada Unit Pelayanan Terpadu	Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan Anak

<b>10.</b>	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Unit pelayanan Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus anak yang Berhadapan dengan hukum masih terbatas	Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran	Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Kasus Anak
<b>11.</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kompetensi aparatur dan masyarakat masih perlu peningkatan dari segi pendidikan dan ketrampilan	Bergesernya nilai-nilai kesetiakawanan sosial terutama di perkotaan	Sudah menguatnya nilai kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial di masyarakat

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

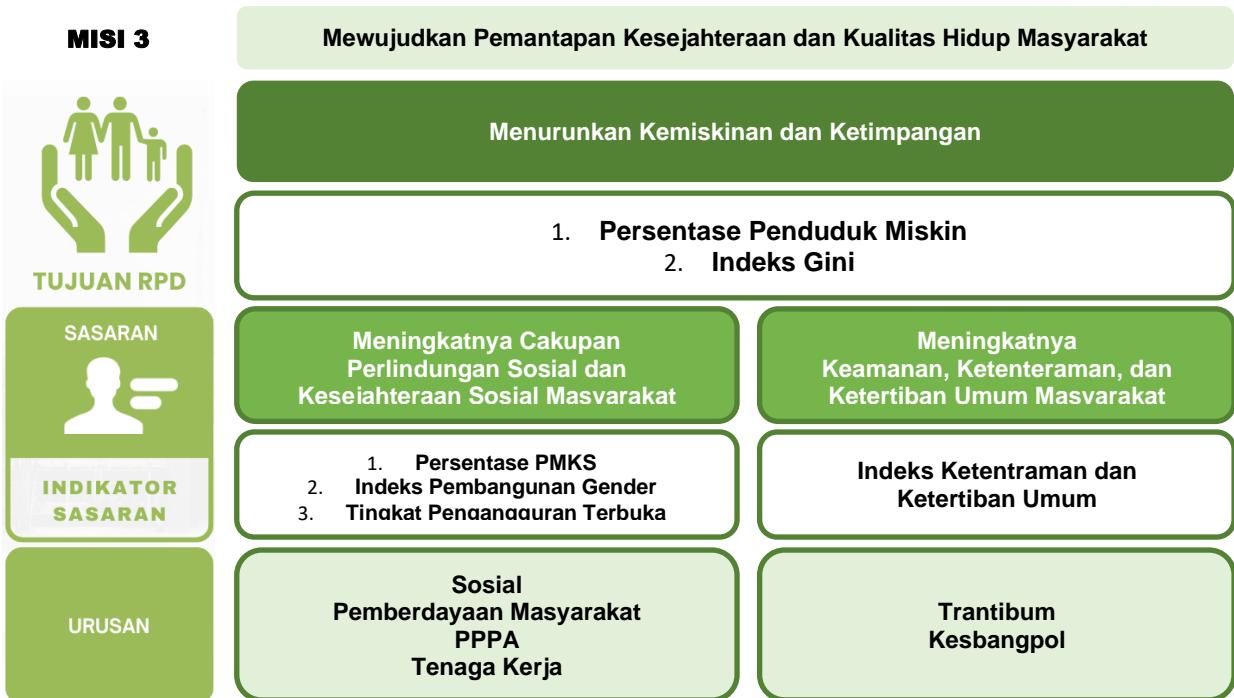
Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat dan Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender.

Berikut Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 - 2026 Pelayanan Perangkat Daerah tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Tahun 2025 – 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja pada Tahun Ke	
			Tujuan / Sasaran	2025	2026
1	Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat		Presentase PMKS	42	40
		Meningkatnya Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	89	89.5
2	Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	96.78	96.91
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Nilai Evaluasi Pengarusutamaan Gender	Utama	Utama
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta tumbuh kembang anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani	100	100
			Kategori Kota Layak Anak	Utama	Utama

Berdasarkan Misi yang dipaparkan pada RPD Kota Probolinggo Tahun 2025 – 2026, Dinas sosial melakukan *supporting* terhadap misi ke III. Adapun penjabaran secara matrikulasi terkait misi dan arah kebijakan kepala Daerah yang menjadi tujuan pada Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah mengacu pada RPD dapat di jelaskan dengan cascading sebagai berikut:



### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 dengan tema:

**Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah melalui penguatan Ekonomi Inklusif yang didukung Pemenuhan Infrastruktur**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah melalui penguatan Ekonomi Inklusif yang mendukung Stabilitas Daerah dan mengacu pada satu prioritas, antara lain untuk Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat ada pada prioritas keenam yaitu “Peningkatan Kemandirian dan kesejahteraan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Pelestarian Kebudayaan Lokal”

Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo terbagi Program dan Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib sebagai berikut:

**Tabel T-C.33**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

<b>Kode</b>	<b>Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2025</b>	<b>Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2025</b>	<b>Rencana Tahun 2025</b>				<b>Catata n Pentin g</b>	<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026</b>	
			<b>Lokasi</b>	<b>Target Capaia n Kinerja</b>	<b>Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif</b>	<b>Sumb er Dana</b>		<b>Target Capaia n Kinerja</b>	<b>Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>								
<b>1.6</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>								
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase penunjang urusana pemerintah daerah yang terselesaikan	Kota Proboling go	100 Persen	7.319.784.7 91	DAU		100 Persen	7.913.395.1 98
<b>1.06.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Proboling go	100 Persen	81.500.000	DAU		100 Persen	85.750.000
1.06.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolinggo	5 Dokume n	16.500.000	DAU		5 Dokume n	18.750.000

1.06.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	65.000.000	DAU		4 Laporan	67.000.000
<b>1.6.1.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>6.168.885.791</b>	<b>DAU</b>		<b>100 Persen</b>	<b>6.764.074.698</b>
1.06.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolinggo	42 Orang	6.014.385.791	DAU		42 Orang	6.598.974.698
1.06.01.2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolinggo	700 Dokumen	94.500.000	DAU		700 Dokumen	100.100.000
1.06.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	60.000.000	DAU		4 Laporan	65.000.000
<b>1.06.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>Kota Probolinggo</b>	<b>100 Persen</b>	<b>12.287.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100 Persen</b>	<b>13.962.500</b>
1.06.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	1 Laporan	12.287.000	DAU		1 Laporan	13.962.500

<b>1.6.1.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	100 Persen	36.000.000	DAU		100 Persen	54.000.000
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Probolinggo	60 paket	24.000.000	DAU		60 paket	30.000.000
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	12 dokumen	12.000.000	DAU		12 dokumen	24.000.000
<b>1.6.1.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	100 Persen	271.631.000	DAU		100 Persen	170.176.000
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	32.515.000	DAU		4 Paket	37.000.000
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	28.000.000	DAU		4 Paket	32.000.000
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	9.306.000	DAU		4 Paket	10.575.000

1.06.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Dokumen	3.432.000	<b>DAU</b>		12 Dokumen	3.900.000
1.06.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	6 Laporan	9.900.000	DAU		6 Laporan	11.250.000
1.06.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	24 Laporan	135.645.000	DAU		24 Laporan	15.414.000
1.06.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolinggo	12 Dokumen	52.833.000	<b>DAU</b>		12 Dokumen	60.037.000
<b>1.06.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>49.115.000</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>55.812.000</b>
1.06.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Probolinggo	5 Unit	22.825.000	DAU		5 Unit	25.937.000
1.06.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolinggo	5 Unit	26.290.000	DAU		5 Unit	29.875.000

<b>1.06.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</b>	Kota Probolinggo	100 Persen	373.666.000	DAU		100 Persen	399.620.000
1.06.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolinggo	4 Laporan	8.163.000	DAU		4 Laporan	9.276.000
1.06.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolinggo	11 Laporan	122.843.000	DAU		11 Laporan	139.594.000
1.06.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	1 Laporan	22.660.000	DAU		1 Laporan	25.750.000
1.06.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Laporan	220.000.000	DAU		12 Laporan	225.000.000
<b>1.06.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Probolinggo	100 Persen	326.700.000	DAU		100 Persen	370.000.000
1.06.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolinggo	1 Unit	42.000.000	DAU		1 Unit	47.000.000

1.06.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Probolinggo	29 Unit	155.000.000	DAU		29 Unit	175.000.000
1.06.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Probolinggo	30 Unit	13.200.000	DAU		30 Unit	15.000.000
1.06.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolinggo	73 Unit	42.500.000	DAU		73 Unit	49.000.000
1.06.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolinggo	4 Unit	74.000.000	DAU		4 Unit	84.000.000
<b>1.6.2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>81 Persen</b>	<b>89.608.307</b>	DAU		<b>82 Persen</b>	<b>80.084.586</b>
<b>1.06.02.2.03.</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Kota Probolinggo	<b>80 Persen</b>	<b>89.608.307</b>	DAU		<b>80 Persen</b>	<b>80.084.586</b>
1.06.02.2.03.00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	29 Orang	15.000.000	DAU		29 Orang	11.000.000

1.06.02.2.03.00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	5 Orang	67.608.307	DAU		5 Orang	63.034.586
1.06.02.2.03.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	14 Lembaga	5.000.000	DAU		14 Lembaga	4.200.000
1.06.02.2.03.00 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Sertifikat	2.000.000	DAU		1 Sertifikat	1.850.000
<b>1.6.4</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	Kota Probolinggo	<b>86 Persen</b>	<b>2.063.349.516</b>	DAU		<b>87 Persen</b>	<b>1.887.207.883</b>
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Probolinggo	80 Persen	1.659.250.00	DAU		80 Persen	1.543.000.00

1.06.04.2.01.00 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	901.250.000	DAU		100 Orang	840.000.000
1.06.04.2.01.00 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	25.000.000	DAU		100 Orang	20.000.000
1.06.04.2.01.00 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	100.000.000	DAU		20 Orang	80.000.000
1.06.04.2.01.00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	32.000.000	DAU		20 Orang	30.000.000
1.06.04.2.01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	225.000.000	DAU		100 Orang	215.000.000
1.06.04.2.01.00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Probolinggo	100 Orang	225.000.000	DAU		100 Orang	215.000.000

		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.04.2.01.00 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	10 Orang	2.000.000	DAU		10 Orang	2.000.000
1.06.04.2.01.00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Orang	75.000.000	DAU		50 Orang	75.000.000
1.06.04.2.01.00 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	4.000.000	<b>DAU</b>		20 Orang	4.000.000
1.06.04.2.01.00 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	10 Orang	5.000.000	<b>DAU</b>		10 Orang	2.000.000
1.06.04.2.01.00 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	30.000.000	DAU		20 Orang	30.000.000

1.06.04.2.01.00 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	35.000.000	DAU		20 Orang	30.000.000
1.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Percentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kota Probolinggo	80 Persen	404.099.516	DAU		80 Persen	344.207.883
1.06.04.2.02.00 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	75 Orang	2.002.016	DAU		75 Orang	1.500.000
1.06.04.2.02.00 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Orang	4.000.000	DAU		60 Orang	3.000.000
1.06.04.2.02.00 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	300 Orang	60.000.000	DAU		300 Orang	47.039.383
1.06.04.2.02.00 04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	75.000.000	DAU		100 Orang	71.387.000

1.06.04.2.02.00 05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	17 Orang	185.000.000	DAU		17 Orang	153.000.000
1.06.04.2.02.00 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	75 Orang	2.500.000	DAU		75 Orang	2.250.000
1.06.04.2.02.00 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	75 Orang	10.000.000	DAU		75 Orang	8.250.000
1.06.04.2.02.00 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	50 Orang	13.400.000	DAU		50 Orang	14.500.000
1.06.04.2.02.00 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Kota Probolinggo	75 Orang	6.250.000	DAU		75 Orang	6.500.000

		Kewenangan Kabupaten/Kota							
1.06.04.2.02.00 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	75 Orang	7.500.000	DAU		75 Orang	8.000.000
1.06.04.2.02.00 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	25 Orang	4.785.000	DAU		25 Orang	5.437.500
1.06.04.2.02.00 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	10.000.000	DAU		20 Orang	5.687.500
1.06.04.2.02.00 13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	20 Orang	15.000.000	DAU		20 Orang	7.812.500
1.06.04.2.02.00 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	8.662.500	DAU		2 Dokumen	9.844.000

<b>1.6.5</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	Kota Probolinggo	<b>41 Persen</b>	<b>642.504.674</b>	DAU		<b>42 Persen</b>	<b>599.172.429</b>
<b>1.06.05.2.02.</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi</b>	Kota Probolinggo	<b>50 Persen</b>	<b>642.504.674</b>	DAU		<b>50 Persen</b>	<b>599.172.429</b>
1.06.05.2.02.00 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Probolinggo	800 Orang	410.000.000	DAU		800 Orang	405.000.000
1.06.05.2.02.00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	120 Keluarga	82.504.674	DAU		120 Keluarga	64.172.429
1.06.05.2.02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	116 Orang	150.000.000	DAU		116 Orang	130.000.000
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>81 Persen</b>	<b>435.468.693</b>	DAU		<b>82 Persen</b>	<b>429.532.835</b>

<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan</b>	Kota Probolinggo	80 Persen	215.000.000	DAU		80 Persen	204.532.835
1.06.06.2.01.00 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	500 Orang	30.000.000	DAU		500 Orang	23.250.000
1.06.06.2.01.00 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	250 Orang	30.000.000	DAU		250 Orang	31.282.835
1.06.06.2.01.00 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Unit	10.000.000	DAU		1 Unit	10.000.000
1.06.06.2.01.00 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	140.000.000	DAU		100 Orang	130.000.000
1.06.06.2.01.00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Orang	5.000.000	DAU		100 Orang	10.000.000

<b>1.06.06.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	Kota Probolinggo	80 Persen	220.468.693	DAU		80 Persen	225.000.000
1.06.06.2.02.00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	225 Orang	220.468.693	DAU		225 Orang	225.000.000
<b>1.6.7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Presentase TMP yang dikelola</b>	Kota Probolinggo	86 Persen	179.853.091	DAU		87 Persen	163.946.990
<b>1.06.07.2.01.</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik</b>	Kota Probolinggo	90 Persen	179.853.091	DAU		90 Persen	163.946.990
1.06.07.2.01.00 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	39.053.091	DAU		1 Dokumen	19.546.990
1.06.07.2.01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Makam	40.000.000	DAU		1 Makam	40.000.000

1.06.07.2.01.00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	24 Laporan	100.800.000	<b>DAU</b>		24 Laporan	104.400.000
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>								
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	Kota Probolinggo	<b>53 Persen</b>	<b>192.471.42 6</b>	<b>DAU</b>		<b>54 Persen</b>	<b>192.312.00 0</b>
<b>2.08.02.2.01.</b>	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas</b>	Kota Probolinggo	<b>55 Persen</b>	<b>66.400.000</b>	<b>DAU</b>		<b>55 Persen</b>	<b>70.046.551</b>
<b>2.08.02.2.01.00 02</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokume n	31.400.000	<b>DAU</b>		2 Dokume n	34.700.000

2.08.02.2.01.00 06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kota Probolinggo	100 Orang	35.000.000	DAU		100 Orang	35.346.551
<b>2.08.02.2.02.</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kota Probolinggo	<b>6 Persen</b>	<b>126.071.426</b>	DAU		<b>6 Persen</b>	<b>125.000.000</b>
2.08.02.2.02.00 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	55.571.426	DAU		2 Dokumen	55.000.000
2.08.02.2.02.00 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	23 Organisasi	70.500.000	DAU		23 Organisasi	70.000.000

<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>192.392.144</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>196.912.342</b>
<b>2.08.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>2.042.144</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>2.172.342</b>
2.08.03.2.01.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	2.042.144	DAU		2 Dokumen	2.172.342
<b>2.08.03.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi</b>		<b>100 Persen</b>	<b>155.500.000</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>157.840.000</b>
2.08.03.2.02.00 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Probolinggo	24 Orang	67.500.000	DAU		24 Orang	69.840.000

2.08.03.2.02.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Layanan	88.000.000	DAU		100 Layanan	88.000.000
<b>2.08.03.2.03.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>34.850.000</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>36.900.000</b>
2.08.03.2.03.00 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Probolinggo	41 Orang	34.850.000	DAU		41 Orang	36.900.000
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Percentase data gender dan anak yang dikelola dan dimanfaatkan</b>	Kota Probolinggo	<b>41 Persen</b>	<b>6.078.323</b>	DAU		<b>42 Persen</b>	<b>6.857.000</b>
<b>2.08.05.2.01.</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase data gender dan anak yang terpilah</b>	Kota Probolinggo	<b>30 Persen</b>	<b>6.078.323</b>	DAU		<b>30 Persen</b>	<b>6.857.000</b>
2.08.05.2.01.00 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di	Kota Probolinggo	1 Dokumen	6.078.323	DAU		1 Dokumen	6.857.000

	Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</b>	Kota Probolinggo	<b>91 Persen</b>	<b>571.245.044</b>	DAU		<b>92 Persen</b>	<b>541.644.786</b>
<b>2.08.06.2.01.</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA</b>	Kota Probolinggo	<b>70 Persen</b>	<b>47.000.000</b>	DAU		<b>70 Persen</b>	<b>44.000.000</b>
2.08.06.2.01.00 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Probolinggo	10 Organisasi	22.000.000	DAU		10 Organisasi	22.000.000
2.08.06.2.01.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	25.000.000	DAU		2 Dokumen	22.000.000
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi</b>	Kota Probolinggo	<b>80 Persen</b>	<b>524.245.044</b>	DAU		<b>80 Persen</b>	<b>497.644.786</b>

2.08.06.2.02.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	29 Dokumen	50.750.000	DAU		29 Dokumen	39.150.000
2.08.06.2.02.00 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	3 Dokumen	397.500.000	DAU		3 Dokumen	384.000.000
2.08.06.2.02.00 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	1 Dokumen	75.995.044	DAU		1 Dokumen	74.494.786
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>276.960.119</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>300.155.475</b>
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	Kota Probolinggo	70 Persen	61.000.000	DAU		70 Persen	65.000.000
2.08.07.2.01.00 04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolinggo	20 orang	61.000.000	DAU		20 orang	65.000.000

<b>2.08.07.2.02.</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>165.960.119</b>	DAU		<b>100 Persen</b>	<b>180.155.475</b>
2.08.07.2.02.00 06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Probolinggo	15 Orang	165.960.119	DAU		15 Orang	180.155.475
<b>2.08.07.2.03.</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	Kota Probolinggo	<b>70 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	DAU		<b>70 Persen</b>	<b>55.000.000</b>
2.08.07.2.03.00 06	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Probolinggo	20 Orang	50.000.000	DAU		20 Orang	55.000.000
2.13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>								
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>	Kota Probolinggo	<b>91 Persen</b>	<b>1.115.113.321</b>	DAU		<b>92 Persen</b>	<b>1.165.431.258</b>

2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	Kota Probolinggo	90 Persen	1.115.113.321	DAU		90 Persen	1.165.431.258
2.13.05.2.01.00 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	1 Dokumen	51.750.000	DAU		1 Dokumen	54.750.000
2.13.05.2.01.00 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Probolinggo	2 Lembaga	920.000.000	DAU		2 Lembaga	960.000.000
2.13.05.2.01.00 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	1 Laporan	136.763.321	DAU		1 Laporan	143.181.258

2.13.05.2.01.00 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	1 Dokume n	6.600.000	DAU		1 Dokume n	7.500.000
-----------------------	---	---	---------------------	------------------	-----------	-----	--	------------------	-----------

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

#### DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berikut daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025:

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2025	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2025	Rencana Tahun 2025			
		Lokasi	Target Capaia n Kinerj a	Kebutuha n Dana/Pag u Indikatif	Sumb er Dana
2	3	4	5	6	7
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>					
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>9.286.092. 877</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang terselesaikan	Kota Probolin ggo	100 Persen	7.103.340. 077	DAU
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Minimal 80%	Kota Probolin ggo	100 Persen	300.690.0 00	DAU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Probolin ggo	5 Dokum en	9.900.000	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Probolin ggo	4 Laporan	290.790.00 0	DAU
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolin ggo	100 Persen	5.307.259. 216	DAU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Probolin ggo	42 Orang	5.250.873.2 16	DAU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Probolin ggo	700 Dokum en	7.800.000	DAU

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Probolinggo	4 Laporan	48.586.000	DAU
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi BMD Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>1.350.000</b>	<b>DAU</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Probolinggo	1 Laporan	1.350.000	DAU
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian PD Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>252.420.468</b>	<b>DAU</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Probolinggo	60 paket	18.000.000	DAU
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Probolinggo	12 dokumen	234.420.468	DAU
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>308.473.243</b>	<b>DAU</b>
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	35.332.100	DAU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	14.068.000	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Probolinggo	4 Paket	9.026.000	DAU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Probolinggo	12 Dokumen	3.120.000	<b>DAU</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Probolinggo	6 Laporan	15.000.000	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Probolinggo	24 Laporan	183.897.143	DAU

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Probolin ggo	12 Dokumen	48.030.000	<b>DAU</b>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi</b>	Kota Probolin ggo	<b>100 Persen</b>	<b>249.000.00</b>	DAU
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Probolin ggo	5 Unit	60.000.000	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Probolin ggo	5 Unit	189.000.00	DAU
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu</b>	Kota Probolin ggo	<b>100 Persen</b>	<b>181.210.00</b>	DAU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Probolin ggo	4 Laporan	7.870.000	<b>DAU</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Probolin ggo	11 Laporan	129.690.00	DAU
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Probolin ggo	1 Laporan	19.650.000	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Probolin ggo	12 Laporan	24.000.000	DAU
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kota Probolin ggo	<b>100 Persen</b>	<b>502.937.150</b>	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Probolin ggo	1 Unit	31.932.050	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Probolin ggo	29 Unit	116.140.00	DAU

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Probolin ggo	30 Unit	20.000.000	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Probolin ggo	73 Unit	66.733.500	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Probolin ggo	4 Unit	268.131.600	DAU
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolin ggo	<b>81 Persen</b>	<b>60.708.800</b>	DAU
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kota Probolin ggo	<b>80 Persen</b>	<b>60.708.800</b>	DAU
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	29 Orang	7.575.000	DAU
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	5 Orang	45.975.000	DAU
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	10 Keluarga	1.499.800	DAU
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	14 Lembaga	4.160.000	DAU
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	1 Sertifikat	1.499.000	DAU

<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	Kota Probolin ggo	<b>86 Persen</b>	<b>1.132.381.000</b>	DAU
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	Kota Probolin ggo	<b>80 Persen</b>	<b>894.825.000</b>	DAU
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	746.000.000	<b>DAU</b>
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	1.450.000	DAU
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	37.250.000	DAU
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	12.500.000	DAU
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	29.875.000	DAU
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	7.700.000	DAU
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	Kota Probolin ggo	10 Orang	1.500.000	DAU

	Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	50 Orang	40.000.000	DAU
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	10.050.000	DAU
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	10 Orang	1.500.000	DAU
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	1.500.000	DAU
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	5.500.000	DAU
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Percentase PMKS lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	Kota Probolin ggo	<b>80 Persen</b>	<b>237.556.0 00</b>	DAU
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	75 Orang		DAU
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	50 Orang		DAU
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	300 Orang	53.250.000	DAU
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	94.496.000	DAU

Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	17 Orang	38.000.000	DAU
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	75 Orang		DAU
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	75 Orang	7.260.000	DAU
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	50 Orang	4.000.000	DAU
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	75 Orang		DAU
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	75 Orang	4.050.000	DAU
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	25 Orang	10.500.000	DAU
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	10.500.000	DAU
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	20 Orang	15.500.000	DAU

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	2 Dokumen		DAU
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>	Kota Probolin ggo	<b>41 Persen</b>	<b>556.144.00</b>	DAU
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Data Fakir Miskin yang sudah diverifikasi dan validasi	Kota Probolin ggo	50 Persen	556.144.00	DAU
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Probolin ggo	800 Orang	373.427.00	DAU
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	120 Keluarga	92.625.000	DAU
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	179 Orang	90.092.000	DAU
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Percentase Layanan Fasilitasi Penanganan Bencana sesuai ketentuan</b>	Kota Probolin ggo	<b>81 Persen</b>	<b>304.862.00</b>	DAU
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Percentase Korban Bencana Alam yang mendapatkan perlindungan	Kota Probolin ggo	80 Persen	156.146.880	DAU
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	500 Orang	51.250.000	DAU

Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	250 Orang	8.796.880	DAU
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	1 Unit	8.200.000	DAU
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	2.400.000	DAU
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	100 Orang	85.500.000	DAU
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	Kota Probolin ggo	<b>80 Persen</b>	<b>148.715.120</b>	DAU
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	225 Orang	148.715.120	DAU
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Presentase TMP yang dikelola</b>	Kota Probolin ggo	<b>86 Persen</b>	<b>128.657.00</b>	DAU
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Sarana Prasarana TMP dalam kondisi baik</b>	Kota Probolin ggo	<b>90 Persen</b>	<b>128.657.00</b>	DAU
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	1 Dokumen	8.750.000	DAU

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	1 Makam	30.400.000	DAU
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	24 Lapora n	89.507.000	DAU
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				2.214.447. 200	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				952.633.20 0	
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Presentase Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)</b>	Kota Probolin ggo	<b>53 Persen</b>	<b>288.890.0 00</b>	DAU
<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas</b>	Kota Probolin ggo	<b>55 Persen</b>	<b>97.450.00 0</b>	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	2 Dokum en	43.710.000	DAU
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kota Probolin ggo	100 Orang	53.740.000	DAU
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Presentase Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Kota Probolin ggo	<b>6 Persen</b>	<b>191.440.0 00</b>	DAU
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	Kota Probolin ggo	2 Dokum en	101.550.00 0	DAU

Ekonomi	Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	23 Organisasi	89.890.000	DAU
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase penanganan permasalahan perempuan sesuai dengan ketentuan</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>109.218.200</b>	DAU
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>500.000</b>	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	2 Dokumen	500.000	DAU
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengaduan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang difasilitasi</b>		<b>100 Persen</b>	<b>108.218.200</b>	DAU
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Probolinggo	24 Orang	100.193.200	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	100 Layanan	8.025.000	DAU
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang</b>	Kota Probolinggo	<b>100 Persen</b>	<b>500.000</b>	DAU

<b>Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>mendapatkan fasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan</b>				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kota Probolin ggo	41 Orang	500.000	DAU
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Percentase data gender dan anak yang dikelola dan dimanfaatkan</b>	Kota Probolin ggo	<b>41 Persen</b>	<b>5.500.000</b>	DAU
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase data gender dan anak yang terpilih</b>	Kota Probolin ggo	<b>30 Persen</b>	<b>5.500.000</b>	DAU
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	1 Dokumen	5.500.000	DAU
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Percentase pencapaian indikator Kota Layak Anak</b>	Kota Probolin ggo	<b>91 Persen</b>	<b>540.000.00</b>	DAU
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang telah berperan serta dalam Pelembagaan PHA</b>	Kota Probolin ggo	<b>70 Persen</b>	<b>109.063.00</b>	DAU
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kota Probolin ggo	10 Organisasi	12.025.000	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	2 Dokumen	97.038.000	DAU

<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang difasilitasi</b>	Kota Probolin ggo	<b>80 Persen</b>	<b>430.937.0 00</b>	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	29 Dokum em	29.575.000	DAU
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	3 Dokum en	352.000.00 0	DAU
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolin ggo	1 Dokum en	49.362.000	DAU
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Percentase penanganan permasalahan anak sesuai dengan ketentuan</b>	Kota Probolin ggo	<b>100 Persen</b>	<b>9.025.000</b>	DAU
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan</b>	Kota Probolin ggo	<b>70 Persen</b>	<b>500.000</b>	DAU
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Probolin ggo	20 orang	500.000	DAU
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	Kota Probolin ggo	<b>100 Persen</b>	<b>8.025.000</b>	DAU
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Kota Probolin ggo	15 Layana n	8.025.000	DAU

<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus</b>	Kota Probolinggo	<b>70 Persen</b>	<b>500.000</b>	DAU
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Kota Probolinggo	20 Orang	500.000	DAU
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				<b>1.261.814.000</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Percentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>	Kota Probolinggo	<b>91 Persen</b>	<b>1.261.814.000</b>	DAU
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat</b>	Kota Probolinggo	<b>90 Persen</b>	<b>1.261.814.000</b>	DAU
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Probolinggo	1 Dokumen	34.800.000	DAU
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Kota Probolinggo	2 Lembaga	834.150.000	DAU

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolin ggo	1 Laporan	50.000.000	DAU
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolin ggo	1 Dokumen	342.864.00 0	DAU

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Renja ini juga secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Probolinggo, Juli 2024

KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PROBOLINGGO



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670711 198809 1 001